
Analisis laporan arus kas daerah dalam Menilai Fundamental Fiskal

Tariza

Universitas Muhammadiyah Palopo
tarizatariza70369@gmail.com

A. Dahri AP

Universitas Muhammadiyah Palopo
Andidahri@stiem.ac.id

Sultan

Universitas Muhammadiyah Palopo
Andidahri@stiem.ac.id

Abstract

This study aims to determine regional fiscal fundamentals by analyzing the cash flow reports of the Luwu Regency Government for the 2017-2021 fiscal year. The research method used is the method of data description and exposition. The description method is used to describe the cash flow of Luwu Regency government activities, while the exposition method is used to analyze cash flow reports for the 2017-2021 fiscal year. The data collection technique uses literature study, namely secondary data in the form of financial reports for the 2017-2021 fiscal year. The results showed that the net cash flow of operating activities had a positive balance, as well as the net cash flow of investing activities and net cash flow of financing activities with a negative balance. This indicated that the Fiscal Fundamentals of the Luwu Regency government had good cash financial performance.

Keywords

Fundamentals Fiscal and Cash Flow

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam Undang – Undang No.32 tahun 2004, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab kepada pemerintah provinsi, serta mampu mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar dapat dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya secara adil (Oki, 2019). Hal tersebut sejalan dengan otonomi daerah yang berlaku sejak januari 2001 dengan tujuan terciptanya kapasitas fiskal yang lebih baik. Menurut Santoso, (2022) kapasitas fiskal merupakan gambaran keuangan setiap daerah yang tercermin pada pendapatan daerah (Santoso, 2022). Serta menjadi tolak ukur dalam kemandirian suatu daerah, Jika kontribusi fiskal suatu daerah semakin besar maka daerah tersebut dapat membiayai sebagian besar kebutuhannya (Musaidah et al., 2017). Namun jika presentase kapasitas fiskal relatif kecil maka tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap dana berimbang yang sangat tinggi terhadap dana yang bersumber dari pusat seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil (Musaidah et al., 2017), Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi

sumber keuangan yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Kania et al., (2018) dan Pujawati et al.,(2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) yang cukup tinggi. Kemudian Oki, (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan daerah rendah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Sejumlah penelitian mengungkapkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi dengan menggali potensi pendapatan daerah yang di wujudkan dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) (Istiningsih & Bawono, 2022; Kania et al., 2018; Widyaningsih, 2018; & Herdiyana, 2019). Penerimaan dari pendapatan asli daerah tersebut akan tergambar pada laporan keuangan pemerintah daerah, salah satunya pada laporan arus kas (Ema Giyan Subekti, 2014). Kurangnya penelitian yang fokus pada analisis laporan arus kas daerah, Meskipun laporan arus kas merupakan salah satu laporan keuangan yang penting dalam menilai kesehatan fiskal suatu daerah, namun masih kurangnya penelitian yang secara khusus memusatkan analisis pada laporan ini. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan laporan arus kas sebagai pendekatan dalam menilai fundamental fiskal daerah.

Laporan arus kas adalah salah satu dari laporan keuangan pemerintah daerah, dimana akan memberikan gambaran tentang mutasi kas akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan (Pandowo & Kudhori, 2017). Serta memberikan informasi mengenai perjalanan kas selama satu periode, dari saldo awal hingga saldo akhir, informasi lain yakni, akan menggambarkan perubahan kas terkait dengan sumber penambahan kas dan penggunaannya (Ema Giyan Subekti, 2014). Meskipun laporan arus kas daerah memiliki peranan yang signifikan dalam mengungkapkan arus masuk dan keluar keuangan daerah serta pengelolaan sumber daya keuangan (Siregar & Ginting, 2017). Namun masih terdapat kekurangan penelitian yang secara khusus mempelajari aspek ini. Terlalu sering, fokus penelitian lebih tertuju pada aspek lain seperti neraca keuangan atau analisis pendapatan dan belanja. Oleh karena itu,

diperlukan lebih banyak penelitian yang secara khusus menganalisis laporan arus kas daerah dalam konteks penilaian fundamental fiskal. Sehingga dapat diharapkan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang kesehatan fiskal daerah dan potensi pengembangan metode analisis yang lebih canggih dalam mengevaluasi fundamental fiskal suatu daerah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik meneliti Fundamental Fiskal daerah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan fiskal suatu daerah, dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

II. LANDASAN TEORI

1. Laporan Keuangan daerah

Laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan (Hedi et al., 2016)

2 Laporan arus kas pemerintah daerah

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintah No 03, peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dilakukan pelaporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Adapun beberapa aktivitas dalam pelaporan arus kas yaitu terdiri dari operasi, investasi dan pembiayaan (Hedi et al., 2016)

Aktivitas Operasi

Adapun kegiatan Aktivitas operasi pemerintah daerah yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan jalannya suatu kegiatan pemerintahan. Diperolehnya informasi arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah dengan dilaporkannya aktivitas arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode. Dalam menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang, adapun aktivitas operasi yang masuk dan peroleh diantaranya yaitu seperti penerimaan perpajakan, penerimaan (PNBP) dan penerimaan hibah. Sedangkan aktivitas operasi yang keluar diantaranya yaitu belanja barang, pegawai dan transfer keluar (Subekti and Hasanudin 2014).

Aktivitas investasi

Aktivitas Investasi perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan (Putri, 2019)

Aktivitas pembiayaan

Dalam aktivitas pembiayaan itu sendiri dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang (Subekti and Hasanudin 2014). baik itu informasi pembiayaan penting untuk menilai apakah keputusan pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah sudah tepat. Struktur pembiayaan tersebut juga menggambarkan rentan tidaknya keuangan daerah yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat resiko daerah (Hedi et al., 2016).

3 Kemampuan Fiskal Pemerintah Daerah

Kemampuan fiskal pemerintah daerah itu sendiri dalam membiayai suatu kegiatan pelaksanaannya baik itu tugas maupun tanggungjawab yang di berikan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan, serta pemerataan dengan mengembangkan seluruh potensi-potensi daerah yang bisa dijadikan sumber pendapatan asli daerah dan mampu mengelola keuangannya dengan tepat guna untuk pembiayaan penyelenggaraan daerahnya dengan mandiri. berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah (Mamangkey et al., 2020).

Kemampuan fiskal dinilai dari besar kecilnya dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sebagai salah satu indikator yang mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap dana pemerintah pusat. Semakin besar sumber dana suatu daerah yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan semakin kecil yang mengakibatkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat kecil (Yanti et al., 2022).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka kemudian menjelaskan fenomena atau kejadian yang ada. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu provinsi selawesi selatan. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan metode *purposive* (Sugiyono 2016) pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan (1) ketersediaan data dan (2) representativitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2017-2021. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis: (a) Analisis arus kas operasi, (b) Analisis Investasi, (c) Analisis pembiayaan.

IV. HASIL PENELITIAN

Perhitungan arus kas bermanfaat dalam mengetahui pertumbuhan atau perkembangan dari masing – masing aktivitas selama beberapa tahun. Pada tabel 1 ringkasan data laporan arus kas pemerintah Kabupaten Luwu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember tahun 2017 hingga tahun 2021.

Tabel 1 Arus kas Kabupaten Luwu tahun 2017-2021

Tahun	Arus kas masuk aktivitas operasi (Rp.000)	Arus kas keluar aktivitas operasi (Rp.000)	Arus kas bersih aktivitas operasi (Rp.000)	Arus kas bersih aktivitas investasi (Rp.000)	Arus kas bersih aktivitas pembiayaan (Rp.000)
2017	1.181.681.827	964.000.656	217.681.170	(217.404.886)	(36.431.990)
2018	1.322.509.683	1.134.044.127	188.465.555	(199.202.199)	(5.516.420)
2019	1.473.232.572	1.149.127.625	324.104.945	(299.630.497)	(4.088.469)
2020	1.451.196.843	1.132.689.820	318.507.021	(285.584.000)	(2.999.850)
2021	1.404.479.365	1.160.911.778	243.567.586	(247.044.109)	(4.317.000)

Sumber : Laporan Keuangan pemerintah kabupaten luwu Tahun 2017-2021.

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat arus kas selama lima tahun terakhir, hal tersebut mencerminkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Luwu periode 2017 sampai dengan 2021 cukup baik . Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Arus kas masuk dari aktivitas operasi selama tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan saldo yang fluktuatif, dimana arus kas masuk pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami pertumbuhan, hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten luwu mampu menggali serta memaksimalkan potensi sumber penerimaan daerah. Namun arus kas masuk tahun 2020 dan 2021 mengalami defisit, diduga penyebab arus kas masuk mengalami defisit, adalah dampak dari pandemi Covid 19 (Farouq Ishak et al., 2021). (2) Arus kas bersih dari aktivitas operasi selama tahun 2017 hingga 2021 memiliki saldo positif. Hal tersebut menggambarkan bahwa saldo positif pada arus kas bersih merupakan hal yang baik, secara internal pemerintah Kabupaten Luwu memiliki kemandirian dana yang cukup untuk digunakan dalam membiayai kegiatan operasional

rutinnya. Selain itu saldo positif mengindikasikan pemerintah daerah memiliki kinerja keuangan yang baik. (Sari, Asaari, and Hidayah 2021). (3) Arus kas bersih dari aktivitas investasi selama tahun 2017 hingga 2021 memiliki saldo negatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa selama lima tahun (2017-2021) pemerintan Kabupaten Luwu aktif melakukan pembangunan fisik dalam bentuk investasi aset tetap yang terlihat pada pengeluaran kas untuk belanja modal (Haryanto 2013). (4) Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan selama tahun 2017 hingga 2021 memiliki saldo negatif. Selama lima tahun tersebut aktivitas pembiayaan terbesar terjadi pada tahun 2017. Saldo negatif tersebut mengindikasikan bahwa adanya kinerja keuangan daerah yang cukup baik sehingga terjadi surplus. Dengan demikian kelebihan dana tersebut dimanfaatkan untuk melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal (Syadeli 2019).

Tabel 2 Pertumbuhan arus kas Kabupen Luwu tahun 2017-2021

Tahun	Arus kas masuk aktivitas operasi (Rp.000)	Arus kas keluar aktivitas operasi (Rp.000)	Arus kas bersih aktivitas operasi (Rp.000)	Arus kas bersih aktivitas investasi (Rp.000)	Selisih arus kas bersih operasional dan aktivitas investasi (Rp.000)	Arus kas bersih aktivitas pembiayaan (Rp.000)
2017	1.181.681.827	964.000.656	217.681.170	(217.404.886)	276.304	(36.431.990)
2018	1.322.509.683	1.134.044.127	188.465.555	(199.202.199)	(10.736.044)	(5.516.420)
2019	1.473.232.572	1.149.127.625	324.104.945	(299.630.497)	24.474.448	(4.088.469)
2020	1.451.196.843	1.132.689.820	318.507.021	(285.584.000)	32.923.021	(2.999.850)
2021	1.404.479.365	1.160.911.778	243.567.586	(247.044.109)	(3.476.523)	(4.317.000)
Pertumbuhan 2017-20221	18,85 %	20%	11,89%	13,63	0	0

Sumber : *Laporan Keuangan Tahun 2017-2021.*

Berdasarkan tabel 2, dapat digambarkan Fundamental Fiskal dan pertumbuhan arus kas selama lima tahun terakhir (2017-2021). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Fundamental kemampuan fiskal pemerintah kabupaten Luwu tergambar pada arus kas masuk aktivitas operasi yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. (2) Arus kas masuk aktivitas operasional dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021) mencapai pertumbuhan 18,85% yakni pada tahun 2017 sebesar Rp.1.181.681.827, naik menjadi 1.404.479.365, pada tahun 2021, dan rata rata setiap tahunnya mengalami pertumbuhan kecuali pada tahun 2019 terjadi penurunan, hal ini kemungkinan dikarenakan dampak dari pandemi Covid 19, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farouq Ishak, Akuntansi, and Bandung (2021). (3) Kemampuan fundamental fiskal kabupaten Luwu dalam membiayai aktivitas operasional dan mendanai aktivitas investasi dalam bentuk belanja modal kebutuhan sarana -prasarana pemerintah dan kebutuhan sarana-prasaranan publik berupa belanja pembangunan jalan, jembatan, dan sebagainya. (4) Pertumbuhan arus kas keluar aktivitas operasi dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021) sebesar 20% dan tingkat pertumbuhan arus kas bersih sebesar 11,89%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten luwu sangat mampu untuk dapat membiayai aktivitas operasionalnya serta mampu menciptakan saldo, sisa kas bersih yang positif, artinya arus kas memenuhi aktivitas operasi, dan mampu mendanai kebutuhan aktivitas investasi yang cenderung negatif (Lau and Zamroni 2018) .

V. KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini untuk kemampuan fiskal daerah, dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja keuangan yang baik dan dapat diasumsikan pemerintah daerah tidak memiliki kesulitan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Ketidakpastian ekonomi dan politik yang melekat dalam proses pengambilan keputusan fiskal. Keadaan ekonomi dapat berubah dengan cepat dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan kebijakan, peristiwa politik, atau kondisi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Farouq Ishak, J., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2021). Covid-19: Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Covid-19: Its Impact on Local Own-Source Revenue. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 587–591.
- Haryanto. 2013. “Pengaruh Informasi SiLPA APBD Dan Arus Kas Terhadap Penganggaran Belanja Modal Berdasarkan Klasifikasi Pemerintah Daerah Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2007.” *E-Jurnal Akuntansi E-Jurnal Akuntansi*.
- Hedi, O., Kudhori, A., Pandowo, H., & Madiun, N. (2016). (*Studi Empiris Di Pemerintah Kota Madiun*). 85–96.
- Herdiyana, D. (2019). Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 22. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.610>
- Istiningsih, W. D., & Bawono, A. D. B. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Pada Periode 2019-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2).
- Kania, A. R., Sebayang, A. F., & ... (2018). Strategi Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten Garut. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 106–112. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/11959>
- Lau, Elfreda Aplonia, and Muhammad Zamroni. 2018. “Pengaruh Informasi Silpa Apbd Dan Arus Kas Terhadap Penganggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Kota Se Indonesia Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.” *Tjyybjb.Ac.Cn* 3(2):58–66.
- Mamangkey, K. K. R. A., Manossoh, H., & Wokas, H. R. N. (2020). *Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2014-2018*. 2(1), 10–22. <https://doi.org/http://doi.org/10.32400/iaj.27174>
- Musaidah, D. A., Riani, I. A. P., & Marlissa, E. R. (2017). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal , Investasi Dan Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 17–34.
- Oki, K. K. (2019). Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT. *EKOPEM | Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 2503–3093.
- Pandowo, H., & Kudhori, A. (2017). *Analisis Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Pemerintah Kota Madiun)*. 85–96.
- Pujawati, P., Badri, H., & Agustiani, E. (2019). Disparitas Antara Kebutuhan Dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 24–36.

<https://doi.org/10.29303/e-jep.v1i1.5>

- Putri, A. (2019). Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal, Komponen Akrua, dan Aliran Kas terhadap Persistensi Laba. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 11.
- Santoso, B. (2022). *Analisis Diskriminan Sektor Ekonomi Pembentuk Kategori Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Propinsi Di Indonesia*. 9(2).
- Siregar, O. K., & Ginting, R. J. (2017). Analisis SiLPA APBD dan Arus Kas dalam Penggunaan Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Karo. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Publik*, 8(1), 91–98.
- Sari, Imelda, Masagus Asaari, and Ika Sefty Nurul Hidayah. 2021. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019.” *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers* (September):408–25.
- Subekti, Ema Giyan, and Mohamad Hasanudin. 2014. “Analisis Laporan Arus Kas Pada Pemerintahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2008-2009.” *Teknis* 9(1):45–52.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung PT Alfabet.
- Syadeli, Moh. 2019. “Hubungan Informasi Silpa Apbd Dan Arus Kas Dengan Penganggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah.” *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis* 12(2):86. doi: 10.33795/j-adbis.v12i2.44.
- Widyaningsih, A. T. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 7(3), 215.
<https://doi.org/10.26418/jebik.v7i3.25893>
- Yanti, D., Yulis, M., Kornita, S. E., Widayatsari, A., Riau, U., & Daerah, P. A. (2022). *Analisis kemampuan dan kemandirian fiscal di kabupaten kuantan singing*.XVI(02), 22–54.